

## Tolikara Dan Sumut

Oleh Dr Nispul Khoiri, MA

**Apa yang terjadi di Tolikara juga rentan terbuka di Sumut. Ketidakerasian kehidupan yang plural selalu menjadi pemicu berbagai kerusuhan, meskipun penyebab utamanya bukan konflik keagamaan atau konflik antar umat beragama**

**K**etika penulis berkunjung langsung ke Papua (2013) bersama rombongan Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara (FKUB Sumut). Kami menyimpulkan tanah Papua tanah damai, hubungan antar umat beragama berjalan harmonis, tidak ada tanda-tanda intoleransi. Semula bagi kami Sumut-lah daerah kondusif, kebanggaan ini hilang setelah melihat Papua-lah miniatur toleransi beragama di Indonesia.

Namun realitas itu kini berubah, kerukunan telah dicerai oleh orang-orang tidak bertanggungjawab, pasinya tidak menggingkan lagi Papua menjadi tanah damai. Idul Fitri 1436 H seharusnya hari bergembira bagi umat Islam di Tolikara menjadi peristiwa berdarah dan mencamkan. Alunan takbir atau tinanya kegembiraan anak-anak menyambut lebaran, berganti jeritan, ketakutan, pertikaian dan pembantaian. Beragam analisis-pun muncul mengembangkan faktor motif konflik. Tetapi perbuatan ini tidak bisa dicerai, harus disusut seluas-luasnya dan negara harus menegakkan keadilan sesungguhnya.

Konflik keagamaan atau konflik antar umat beragama, seringkali menjadi titik rawan dimanfaatkan dan diklaim sebagai tuntutan-memicu terjadinya konflik-konflik berkeparangan. Karena di sini ada doktrin sifatnya fundamental. Ketika seseorang dalam keadaan marah (Miras) sekalipun, saat terpanggil

keagamaan yang dikembangkan para pemimpinnya. Atau adanya agama tertentu mengatur agamalah. Motif seperti ini selalu memunculkan faktor potensi konflik keagamaan.

Apa yang terjadi di Tolikara juga rentan terbuka di Sumut. Ketidakerasian kehidupan yang plural selalu menjadi pemicu terjadinya berbagai kerusuhan, meskipun penyebab utamanya bukan konflik keagamaan atau konflik antar umat beragama. Menurut Lewis Coser, konflik setiap daerah dan bangsa merupakan hal realistik. Konflik itu tidak pernah dapat dihilangkan, setiap pemecahan konflik melahirkan kepentingan baru dan pada gilirannya akan melahirkan konflik baru lagi.

Pada konteks Sumut, ketebukan konflik terletak dari potret pluralitas yang terakristal dalam kelompok-kelompok etnis, budaya dan agama, serta varian-varian organisasi, baik organisasi kemasyarakatan kesamaan kegiatan, profesi, fungsional pemuda, wanita, maupun organisasi kemasyarakatan keagamaan. Satu sisi realitas ini menjadi kebanggaan dan menjadi kekuatan daerah ini sehingga mampu mengelola perbedaan menjadi potensi luar biasa. Namun keanekaragaman ini begitu rentan dengan konflik dan memicu ketegangan sosial, manakala pihak-pihak terlibat tidak bisa saling menghargai perbedaan masing-masing, hal ini berpotensi menimbulkan potensi perpecahan baik skala kecil maupun besar.



menyelesaikan konflik komprehensif dan integral dimaksud.

Kenyataannya terbalik, jika terjadi konflik penyelesaiannya selalu terkesan lamban. Ikipun sporadis, penyelesaian pemerintahan sendiri seperti penadatan kebakaran. Begitu muncul konflik, baru ditangani tanpa dantisi-pasi lebih jauh secara komprehensif dan integral. Kasus Tolikara misalnya, menurut banyak kalangan ditangani lambat, sekiranya kehadiran negara cepat mengantisipasi pertikaian Tolikara, keberjanya instrumen negara (POLDA-BINDA dan lainnya) maka pertumpahan darah tidak akan terjadi.

menjukkan keunikan ini menjadi domain pemerintah semata. Tetapi dibutuhkan semangat masyarakat dan berbagai elemen penting di daerah ini dalam mengawal ketertarikan kerukunan. Penguatan institusi keagamaan menjadi langkah penting baik sudah terbentuk maupun belum terbentuk untuk membangun dan mengawal harmonisasi sosial dan persatuan nasional sebagai upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi ideal menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.

Ekstensi institusi keagamaan mulai dari



melakukan *jihad* walau baru sebatas isu, seseorang tersebut pasti maju ke depan. Sungguhnya substansi semua agama mengajarkan kedamaian, kerukunan dan saling menghormati.

Dalam konteks tertentu dan tahapan dimana konsep *jihad* itu perlu dilaksanakan. Persolannya justru masing-masing kelompok penganut agama menanamkan merasa paling benar dan cenderung menyalahkan kelompok penganut agama lain serta berorientasi menyalahkan penganut agama lain dari wilayahnya. Masing-masing kelompok penganut agama merasa dalam mengekspresikan sikap bermusuhan dan sekaligus sebagai sarana membangun solidaritas kelompoknya menggunakan simbol keagamaan. Masing-masing kelompok penganut agama didukung semangat *jihad* atau perang suci yang bersifat

**Pemadam Kebakaran**  
Harus diakui tidaklah mudah untuk menyelesaikan konflik bernuansa keagamaan dan lainnya, karena sifatnya fundamental menyangkut aspek keimanan. Apalagi konflik keagamaan ini tidak hanya disebabkan faktor ekonomi, politik, ideologi, sosial budaya dan keamanan turut mempengaruhi terjadinya konflik. Sebaliknya suatu konflik disulut bukan faktor agama, tetapi lebih disebabkan konflik kepentingan politik dan kepentingan lokal lain yang melibatkan agama di belakangnya. Tetapi bukan berarti konflik keagamaan dan lainnya tidak bisa diatasi, membutuhkan proses penanganannya lebih komprehensif dan integral. Kehadiran negara dan pemerintah adalah bagian tidak terpisahkan dalam pe-

Menyadari hal ini, sudah barang tentu diperlukan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama dan pemerintah untuk memelihara kerukunan. Diperlukan interaksi aktif antar umat seagama maupun antar umat berbeda agama, ataupun antara Ormas dari unsur keragaman rukun dan toleran. Terkait dengan pemerintahan, berbagai kebijakan dalam semua aspek juga perlu dirancang sangat hati-hati. Karena apabila dilakukan dengan pendekatan tidak memperhatikan keragaman sosial atau kebijakan menciptakan diskriminasi bagi agama tertentu, justru menjadi pemicu potensi konflik.

**Penguatan Institusi Keagamaan**  
Dalam halantisipasi konflik secara komprehensif dan integral, tidak selamanya inisiatif

Ormas, tidak saja membantu memperkuat landasan dan dasar-dasar tentang kerukunan internal dan antar umat beragama. Tetapi juga membantu pemerintah membangun kondusifitas daerah ini. Kerukunan umat beragama dan antar umat beragama menjadi sebuah keniscayaan. Tidak saja di Tolikara Papua, tetapi juga Sumut dan daerah lainnya. Kerukunan harus menjadi simpul yang kuat dari masyarakat, daerah dan negara. Disamping penghayatan dan pengamalan pemeluk agama yang benar, merupakan daya tangkal paling ampuh terhadap provokasi konflik antar agama dan lainnya.

Penulis adalah Ketua Prodi Bimbingan  
Penyuluhan Islam FDK UIN-SU Dan Pengurus  
Forum Kerukunan Umat Beragama Sumut